

Implementasi Standar Kompetensi Lulusan dalam Transformasi Mutu Lulusan pada PKBM Bina Ilmu Kabupaten Rokan Hulu

Implementation of Graduate Competency Standards in the Transformation of Graduate Quality at PKBM Bina Ilmu, Rokan Hulu Regency

Adibah Feikha Naylah, Rahmat Fahmi

Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 23 April 2026

Revised 25 April 2026

Accepted 30 April 2026

Available online 09 May 2026

Keywords

Standar Kompetensi Lulusan, PKBM, Pendidikan Nonformal, Mutu Lulusan, Rokan Hulu

Kata kunci:

Graduate Competency Standards, PKBM, Non-Formal Education, Graduate Quality, Rokan Hulu



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam upaya transformasi mutu lulusan pada satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan fokus pada PKBM Bina Ilmu Pasir Pengaraian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan kunci terdiri dari pengelola PKBM, tutor, dan warga belajar yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SKL di PKBM Bina Ilmu telah mengacu pada Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 yang diperbarui melalui Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025, mencakup tiga dimensi utama: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengendalian mutu dilakukan melalui sistem penilaian autentik meliputi penilaian portofolio, unjuk kerja, dan penilaian sikap berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keberagaman latar belakang warga belajar, keterbatasan kompetensi tutor, dan disparitas fasilitas antara wilayah perkotaan dan terpencil. Sinergi antara regulasi nasional, fleksibilitas kurikulum berbasis potensi lokal agroindustri, serta kepemimpinan

transformatif pengelola menjadi faktor kunci keberhasilan pencapaian SKL. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas tutor sebagai upaya strategis dalam meningkatkan daya saing lulusan pendidikan kesetaraan di Rokan Hulu.

ABSTRAK

This study aims to analyze the implementation of Graduate Competency Standards (SKL) in transforming the quality of graduates at Community Learning Center (PKBM) units in Rokan Hulu Regency, Riau Province, focusing on PKBM Bina Ilmu in Pasir Pengaraian. The research employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Key informants comprising PKBM administrators, tutors, and learning participants were selected through purposive sampling. Findings reveal that SKL implementation at PKBM Bina Ilmu references Permendikbudristek Number 5 of 2022, updated by Permendikdasmen Number 10 of 2025, covering three core dimensions: attitudes, knowledge, and skills. Quality control is enacted through authentic assessment systems including portfolio evaluation, performance assessment, and continuous attitudinal assessment. Key challenges include diverse learner backgrounds, limited tutor competence, and facility disparities between urban and remote areas. The synergy of national regulation, flexible agro-industry-based local curriculum, and transformative leadership proves critical to SKL achievement. This study recommends strengthening sustainable internal quality assurance systems (SPMI) and enhancing tutor capacity as strategic measures to improve the competitiveness of non-formal education graduates in Rokan Hulu.

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu sistem pendidikan diukur dari kemampuannya menghasilkan lulusan yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pendidikan yang bermutu tidak hanya

*Corresponding Author

Email: adibahfeikhanayla@gmail.com

berorientasi pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pada pembentukan keterampilan, sikap, dan karakter yang memungkinkan peserta didik beradaptasi dengan dinamika sosial-ekonomi. Di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang tengah berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rangka mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota maju lainnya di Riau, upaya peningkatan kualitas pendidikan menjadi sangat krusial. Peningkatan kualitas ini memerlukan pengelolaan yang efektif agar setiap program, khususnya di jalur nonformal, mampu memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan warga belajar (Mulyanto et al., 2025). Hal ini sejalan dengan tantangan bonus demografi di mana 69,03% penduduk Indonesia berada pada usia produktif yang membutuhkan akses keterampilan praktis

Di Indonesia, upaya menjaga mutu pendidikan dilakukan melalui penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai kriteria minimal yang wajib dipenuhi. Di Kabupaten Rokan Hulu, angka putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi persoalan serius yang menuntut peran vital pendidikan nonformal sebagai solusi aksesibel bagi masyarakat yang belum terjangkau pendidikan formal. SNP menjadi instrumen krusial dalam melakukan analisis perencanaan dan standarisasi pada satuan pendidikan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di berbagai kecamatan di Rokan Hulu (Handayani et al., 2025). Tanpa standar yang jelas sebagai tolok ukur, pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Rokan Hulu yang memiliki karakteristik geografis beragam akan sulit diukur dan dikendalikan secara sistematis.

Pendidikan masyarakat di Rokan Hulu memiliki karakteristik unik karena berbasis pada kekuatan komunitas dan fleksibilitas, mengingat wilayah ini memiliki potensi perkebunan dan sumber daya alam yang besar namun juga menghadapi tantangan keterjangkauan layanan pendidikan. Program-program ini dirancang untuk menjawab persoalan sosial-ekonomi melalui kurikulum yang relevan dengan kecakapan hidup dan potensi daerah (Munir et al., 2025). Dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan masyarakat, pemahaman terhadap delapan standar nasional menjadi dasar untuk membedakan antara Quality Assurance dan Quality Control. Penjaminan mutu berfokus pada upaya sistematis sejak tahap perencanaan, sementara pengendalian mutu hasil akhir pendidikan masyarakat di Rokan Hulu tetap memenuhi standar kualitas nasional yang diakui.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi Standar Kompetensi Lulusan pada PKBM di Kabupaten Rokan Hulu. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya mengungkap makna, proses, dan konteks implementasi kebijakan pendidikan nonformal secara holistik, sebagaimana dikemukakan oleh Creswell & Poth (2018) bahwa penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial dalam setting alamiahnya. Penelitian dilaksanakan di PKBM Bina Ilmu yang berlokasi di Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Putih, Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa PKBM Bina Ilmu merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal representatif di ibu kota Kabupaten Rokan Hulu. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengamati secara langsung penerapan SKL dalam aktivitas belajar mengajar, interaksi tutor dan warga belajar, dan penggunaan instrumen penilaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika dan Urgensi Standar Nasional Pendidikan pada LPNF di Rokan Hulu

Di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada

Lembaga Pendidikan Nonformal (LPNF) bukan sekadar adopsi kaku, melainkan kerangka kerja untuk menjaga mutu dan relevansi layanan pendidikan di tengah kondisi geografis yang beragam. Di lembaga seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar dari Ujungbatu hingga Tambusai Utara, standar ini berfungsi sebagai kompas agar fleksibilitas pembelajaran tidak mengabaikan mutu output. Tanpa adanya standar yang terukur, layanan pendidikan masyarakat berisiko kehilangan legitimasi di tengah masyarakat Rokan Hulu yang semakin sadar akan pentingnya pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, SNP hadir untuk memberikan kepastian bahwa setiap PKBM di Rokan Hulu memiliki kriteria minimal yang akuntabel.

Secara regulasi, LPNF di Rokan Hulu memiliki ruang gerak yang luas dalam mengintegrasikan nilai budaya Melayu dan kearifan lokal ke dalam metode belajar, namun tetap terikat pada penjaminan mutu nasional sesuai UU No. 20 Tahun 2003. Implementasi SNP di Kabupaten Rokan Hulu harus mampu menyeimbangkan regulasi pusat dengan kearifan lokal, seperti penggunaan pendekatan kewirausahaan berbasis perkebunan kelapa sawit, karet, dan potensi agroindustri daerah dalam Standar Isi. Hal ini menunjukkan bahwa standarisasi pendidikan nonformal di wilayah ini adalah upaya menciptakan sistem yang inklusif namun tetap memiliki daya saing tinggi secara nasional. Sinergi antara kebijakan daerah dan standar pusat menjadi kunci keberhasilan PKBM dalam menekan angka putus sekolah

Dalam perspektif manajemen, SNP menjadi instrumen strategis bagi pengelola PKBM di Rokan Hulu untuk melakukan pemetaan kekuatan lembaga di tengah persaingan pendidikan yang ketat. Analisis perencanaan yang matang sangat bergantung pada pemahaman pengelola terhadap delapan standar tersebut untuk menyusun rencana kerja tahunan. Melalui standarisasi, PKBM dapat menentukan prioritas pengembangan, misalnya memperkuat kualitas tutor bersertifikasi guna memenuhi Standar Pendidik. Standar ini pun menjadi basis bagi lembaga untuk melakukan perbaikan berkelanjutan demi menjaga kepercayaan warga belajar yang kian kritis (Handayani et al., 2025).

Penjaminan mutu di PKBM wilayah Rokan Hulu sering kali menghadapi tantangan disparitas fasilitas antara wilayah perkotaan seperti Pasir Pengaraian dan wilayah terpencil di kecamatan pedalaman, sehingga SNP berfungsi sebagai penyeimbang prioritas kerja. Dengan merujuk pada standar nasional, lembaga di daerah terpencil seperti pelosok Kecamatan Bonai Darussalam tetap didorong untuk mencapai kriteria minimal layanan.

Tabel 1 perbandingan daerah pasir pengarian dengan bonai darussalam

NO	Aspek	Pasir Pengarian	Bonai Darussalam
1.	Kualifikasi tutor	Mayoritasnya sarjana dan Sebagian bersertifikat pendidik kesetaraan	Mayoritasnya banyak hanya lulusan SMA
2.	Sarana dan prasaran	Hampir memiliki fasilitas yang lengkap di PKBM nya	Banyak memiliki kekurangan dalam fasilitas PKBM nya
3.	Kurikulum	Mengikuti kebijakan terbaru kemendikbud	Menggunakan kurikulum kesetaraan yang lama
4.	Metode pembelajaran	Menggunakan berbagai	Hampir 100% ceramah 1

		macam metode pembelajaran yang efektif	arah saja
5.	Angka putus sekolah	Masih di angka yang rendah factor ekonomi masih ada namun tidak begitu dominan	Banyak warga belajar yang memprioritaskan pekerjaannya

Evaluasi mutu yang objektif hanya bisa terjadi jika lembaga memiliki rujukan yang jelas dan diakui secara legal oleh Dinas Pendidikan setempat. Tanpa rujukan tersebut, proses monitoring dan evaluasi internal hanya akan bersifat administratif tanpa menyentuh esensi kualitas. Optimalisasi pembelajaran di lembaga nonformal Rokan Hulu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana standar proses diterapkan secara konsisten melalui metode yang partisipatif dan kontekstual. Ketika standar telah terinternalisasi, PKBM di Rokan Hulu cenderung mampu melahirkan program unggulan yang melampaui standar minimal. Hal ini terbukti mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap jalur pendidikan kesetaraan sebagai solusi pendidikan yang bermartabat

Fleksibilitas LPNF di Rokan Hulu justru menjadi kekuatan dalam menerapkan SNP secara kontekstual di era digital. Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar dan perkembangan sektor industri yang pesat, PKBM di Rokan Hulu dituntut untuk lebih lincah dalam merespons kebutuhan pasar kerja lokal melalui Standar Kompetensi Lulusan yang relevan. Standar nasional memberikan batasan "apa" yang harus dicapai, sementara lembaga memiliki kedaulatan untuk menentukan "bagaimana" cara mencapainya sesuai dengan karakteristik warga belajar. Sinergi inilah yang menjadikan pendidikan nonformal tetap menjadi pilar penting dalam mencetak SDM unggul (Mulyanto et al., 2025).

Implementasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai Dasar Pengendalian Mutu di PKBM Rokan Hulu

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan muara utama dari seluruh kegiatan pendidikan di PKBM di Rokan Hulu, yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam konteks pendidikan masyarakat di Rokan Hulu, SKL tidak boleh hanya dipandang sebagai syarat kelulusan ujian kesetaraan, melainkan sebagai manifestasi keberdayaan warga belajar untuk mandiri. Manajemen peningkatan mutu yang terarah pada SKL memberikan kepastian bahwa lulusan Paket A, B, dan C memiliki kompetensi yang diakui oleh sektor industri perkebunan, perdagangan, dan jasa (Cahyono, 2023). Hal ini krusial untuk memastikan ijazah PKBM memiliki nilai tawar yang sama dengan jalur formal.

Implementasi SKL di PKBM Rokan Hulu menuntut adanya penyelarasan antara standar isi dan kurikulum berbasis potensi daerah. Kurikulum pendidikan kesetaraan harus dirancang agar materi yang disampaikan, seperti keterampilan agribisnis, pengolahan hasil perkebunan, atau literasi digital, secara langsung mendukung ketercapaian kompetensi lulusan. Misalnya, pada jenjang Paket C, Standar Isi di PKBM wilayah Rokan Hulu sering kali diarahkan pada persiapan vokasional yang sinkron dengan kebutuhan lapangan kerja lokal di sektor perkebunan dan agroindustri. Penyelarasan ini memastikan setiap aktivitas pembelajaran memiliki kontribusi nyata terhadap profil lulusan yang kompeten.

Proses pengendalian mutu (Quality Control) terhadap SKL dilakukan melalui sistem penilaian yang autentik, mengingat Kabupaten Rokan Hulu memiliki keberagaman kondisi sosial-ekonomi yang menuntut pendekatan evaluasi yang kontekstual. Di PKBM, penilaian tidak cukup hanya melalui ujian kertas, tetapi harus mencakup penilaian portofolio dan unjuk kerja yang mencerminkan kemampuan nyata warga belajar. Jika hasil evaluasi menunjukkan kesenjangan

kompetensi, pengelola PKBM harus segera melakukan intervensi pada standar proses atau kompetensi tutor. SKL dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen audit untuk melihat sejauh mana investasi pendidikan telah menghasilkan perubahan perilaku pada siswa

Keberhasilan pencapaian SKL di Rokan Hulu juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tutor yang mampu menerapkan pendekatan andragogi secara efektif. Tutor di PKBM Rokan Hulu dituntut menerjemahkan indikator SKL menjadi pengalaman belajar yang relevan dengan realitas sosial budaya masyarakat Melayu dan komunitas lokal setempat. Kepemimpinan transformatif dari pengelola PKBM dalam memfasilitasi pengembangan profesional tutor menjadi kunci agar standar kompetensi dapat tercapai secara maksimal. Tanpa tutor yang kompeten, target-target dalam SKL hanya akan menjadi dokumen formalitas tanpa dampak substantif (Alam et al., 2025).

Tantangan penerapan SKL di PKBM wilayah Rokan Hulu terletak pada keberagaman latar belakang warga belajar, dari buruh perkebunan hingga masyarakat rentan ekonomi di wilayah terpencil. Oleh karena itu, pengendalian mutu harus dilakukan dengan pendekatan yang fleksibel namun tetap merujuk pada standar nasional tunggal. Lembaga perlu menyediakan modul tambahan atau pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa agar kompetensi minimal dapat terlampaui. Strategi ini memastikan bahwa setiap lulusan PKBM di Rokan Hulu memiliki daya saing yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi

Penerapan SKL di PKBM Bina Ilmu Kabupaten Rokan Hulu

PKBM Bina Ilmu merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang berlokasi di Jl. Tuanku Tambusai 413, Pasir Putih, Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sebagai salah satu PKBM yang terdaftar dalam sistem data Kemendikdasmen dengan NPSN yang terverifikasi, PKBM Bina Ilmu menjadi salah satu representasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di wilayah ibu kota Kabupaten Rokan Hulu. Lembaga ini berperan aktif dalam melayani masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan alternatif, khususnya bagi mereka yang karena berbagai alasan tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal (Kemendikdasmen, 2025). Keberadaan PKBM Bina Ilmu di Pasir Pengaraian menjadikannya sebagai ujung tombak layanan pendidikan kesetaraan di lingkungan perkotaan Kabupaten Rokan Hulu

Dalam implementasi Standar Kompetensi Lulusan, PKBM Bina Ilmu mengacu pada Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, yang kemudian diperbarui melalui Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025. SKL yang diterapkan mencakup tiga dimensi utama yaitu dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan yang harus dicapai oleh setiap warga belajar pada akhir jenjang Paket A, B, maupun C (Fauzi, 2016). Sesuai dengan ketentuan PKBM Bina Ilmu diwajibkan untuk menyusun dokumen SKL yang dipilah berdasarkan jenis program yang diselenggarakan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala PKBM, sehingga dokumen tersebut tidak hanya menjadi kelengkapan administratif tetapi juga panduan substantif bagi seluruh tutor dalam merancang pembelajaran

Program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan PKBM Bina Ilmu mencakup Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA), dengan pendekatan pembelajaran yang memadukan konten akademik dengan kecakapan hidup yang relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Rokan Hulu. Pada jenjang Paket A, SKL diarahkan pada pemilihan keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada Paket B ditekankan keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja sementara pada Paket C difokuskan pada pemilihan keterampilan berwirausaha sesuai potensi lokal. Dengan konteks Rokan Hulu yang kaya akan sektor perkebunan dan perdagangan, PKBM Bina Ilmu mengintegrasikan muatan lokal kewirausahaan agribisnis ke dalam kurikulum Paket C agar kompetensi lulusan selaras dengan

peluang kerja yang tersedia di wilayah Pasir Pengaraian dan sekitarnya.

Sistem penilaian yang diterapkan di PKBM Bina Ilmu dirancang untuk mengukur ketercapaian SKL secara komprehensif dan autentik. Penilaian tidak semata-mata berbasis ujian tertulis, melainkan juga mencakup penilaian portofolio, unjuk kerja, dan penilaian sikap yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian yang menegaskan bahwa mekanisme penilaian harus mampu mencerminkan kemampuan nyata peserta didik (YPAB, 2024). Dengan sistem penilaian yang autentik, PKBM Bina Ilmu dapat mendeteksi secara dini apabila terdapat kesenjangan antara kompetensi yang dicapai warga belajar dengan target SKL, sehingga intervensi pembelajaran dapat segera dilakukan melalui penyesuaian metode atau penguatan materi oleh tutor

Tantangan utama yang dihadapi PKBM Bina Ilmu dalam mengimplementasikan SKL adalah keberagaman latar belakang dan motivasi warga belajarnya. Warga belajar di PKBM Bina Ilmu terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja di sektor informal, ibu rumah tangga, hingga remaja putus sekolah yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan. Keberagaman ini menuntut pendekatan andragogi yang fleksibel dan personal dari para tutor agar indikator SKL dapat dicapai oleh seluruh warga belajar tanpa terkecuali (Alam et al., 2025). Pengelola PKBM Bina Ilmu dituntut untuk secara aktif memfasilitasi pengembangan kompetensi tutor melalui pelatihan dan bimbingan teknis, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh berbagai PKBM di Riau dalam kerangka penguatan pendidikan kesetaraan di wilayah Sumatera.

Dalam konteks penjaminan mutu, PKBM Bina Ilmu berupaya membangun budaya mutu yang berkelanjutan dengan menjadikan SKL sebagai tolok ukur utama keberhasilan program. Upaya ini diwujudkan melalui siklus evaluasi diri secara berkala, pembaruan rencana kerja tahunan berdasarkan hasil evaluasi, serta keterlibatan aktif tutor dan warga belajar dalam proses penjaminan mutu internal (Habibi et al., 2022). Dengan dukungan regulasi terbaru yaitu Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan penerbitan ijazah secara mandiri kepada satuan pendidikan yang telah terakreditasi, PKBM Bina Ilmu memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan setiap lulusannya benar-benar memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan sebelum ijazah diterbitkan. Hal ini menjadikan implementasi SKL bukan lagi sekadar urusan dokumen, melainkan komitmen institusional terhadap kualitas lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Rokan Hulu.

SIMPULAN

Implementasi Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau merupakan fondasi krusial dalam sistem penjaminan mutu (Quality Assurance) dan pengendalian mutu (Quality Control) pada lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM. Fokus utama pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang diintegrasikan dengan manajemen peningkatan mutu yang efektif terbukti mampu menjamin bahwa lulusan pendidikan kesetaraan memiliki daya saing, kemandirian, dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan era digital serta potensi lokal (Cahyono, 2023; Alam et al., 2025).

Secara khusus, PKBM Bina Ilmu di Pasir Pengaraian menjadi salah satu representasi nyata bagaimana sebuah lembaga pendidikan nonformal di Rokan Hulu berupaya menerjemahkan amanat SKL nasional ke dalam praktik pembelajaran yang kontekstual dan berdampak bagi masyarakat. Dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 yang kini diperbarui oleh Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025, serta didukung oleh kewenangan penerbitan ijazah mandiri berdasarkan Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024, PKBM Bina Ilmu dan seluruh PKBM di Kabupaten Rokan Hulu dituntut untuk semakin akuntabel dalam memastikan mutu

lulusannya. Dengan sinergi antara regulasi nasional dan fleksibilitas kurikulum Merdeka Belajar, PKBM tidak hanya berperan sebagai jalur pendidikan alternatif, tetapi juga sebagai institusi yang akuntabel dalam mencetak sumber daya manusia yang bermutu secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan beberapa hal berikut: (1) Pengelola PKBM perlu memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menjadikan SKL sebagai acuan utama dalam setiap siklus evaluasi; (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu perlu meningkatkan frekuensi pembinaan dan supervisi terhadap PKBM, khususnya di wilayah terpencil; (3) Program peningkatan kompetensi tutor melalui pelatihan andragogi dan literasi digital perlu diprioritaskan; serta (4) Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang implementasi SKL terhadap keberdayaan ekonomi lulusan PKBM di Kabupaten Rokan Hulu.

REFERENSI

- Alam, T. B., Mattalatta, M., Ansar, A., Kurniawaty, K., & Safrida, S. (2025). Peran kepemimpinan transformasi dalam kecerdasan belajar dan proses belajar untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian siswa pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 127–140.
- Anwar, S., & Miftahudin, M. (2021). Manajemen pendidikan nonformal berbasis komunitas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 15(2), 88– 101.
- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal. (2023). Instrumen akreditasi PKBM dan standar penilaian BAN-PDM. Jakarta: Kemendikdasmen.
- Cahyono, I. R. (2023). Manajemen peningkatan mutu lulusan program kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Madinah Kota Kediri [Skripsi, IAIN Kediri].
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Damayanti, D. P. (2025). Analisis implementasi kebijakan merdeka belajar dalam satuan pendidikan nonformal di Indonesia. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(7), 7033–7043.
- Darling-Hammond, L., & Snyder, J. (2000). Authentic assessment of teaching in context. *Teaching and Teacher Education*, 16(5–6), 523–545.
- Fauzi, E. P. (2016). Pemenuhan standar kompetensi lulusan pendidikan kesetaraan dalam akreditasi. *Pencerahan Pendidikan Nonformal*. Diakses dari <http://fauziep.com>
- Habibi, H., Arismunandar, A., Rahman, A., & Darmawangsa, A. (2022). Internal quality assurance management as a strategy for achieving national education standards. *Journal of K6 Education and Management*, 4(3), 352–363.
- Handayani, S., Purwanti, H., Anggraeni, F. N., & Setiawan, A. (2025). Analisis perencanaan dan standarisasi pendidikan di PKBM Minda Utama Kota Bandung. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(5), 5354–5363.
- Hidayat, R., & Machali, I. (2022). *Manajemen pendidikan: Konsep dan prinsip pengelolaan pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Huang, H. B. (2010). What is good action research? Why the resurgent interest? *Action Research*, 8(1), 93–109.
- Kemendikdasmen. (2025). Data pokok pendidikan: Profil PKBM Bina Ilmu Kabupaten Rokan Hulu. Diakses dari <https://sekolah.data.kemendikdasmen.go.id>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

- Merriam, S. B., & Bierema, L. L. (2014). *Adult learning: Linking theory and practice*. Jossey- Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto, A., Fatah, A., Khomaeni, A., & Ichwan, R. (2025). Peningkatan kualitas lulusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda Kabupaten Bekasi melalui pengelolaan efektif. *Jurnal Abdi Insani*, 12(1), 13–22.
- Munir, A. S. A., Basawadi, H., Huriyah, L., Rohaizan, R., & Malik, A. (2025). Kurikulum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket A, B, dan C. *Jurnal Kependidikan Islam*, 15(1), 77– 86.
- Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Rahman. (2020). Evaluasi program pendidikan nonformal berbasis standar nasional. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 5(1), 34–47.
- Sihombing, U. (2001). *Pendidikan luar sekolah: Masalah, tantangan dan peluang*. Jakarta: CV Wirakarsa.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Urfi, M., Shunhaji, A., & Nawawi, A. (2025). Optimalisasi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas lulusan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Labora Edukasi Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 6(1), 45–58.
- YPAB. (2024). Kumpulan peraturan perundangan pendidikan kesetaraan. Diakses dari <https://ypab.org/perundangan/>